

**02** GOVERNMENTTODAY  
Dinilai Bebas APBN, Skema Pensiun PNS Bakal Diubah

**05** NUSANTARA  
Warning Bjorka: Ancaman Ransomware Mengintai BCA dan BSI

**08** FAMILY  
Roti Sourdough  
Pilihan Sehat untuk Makanan Sehat

**15 KEMENTERIAN/LEMBAGA  
TIDAK KENA PEMANGKASAN**

	Kemenhan	166.26 T
	Polri	126.64 T
	Badan Gizi Nasional	71 T
	Kejagung	24.38 T
	Mahkamah Agung	12.68 T
	BIN	7.05 T
	DPR RI	6.69 T
	BPK	6.15 T
	BPKP	2.47 T
	BNN	2.25 T
	KPK	1.26 T
	MPR RI	969 M
	MK	611 M
	PPATK	354 M
	Kementerian Ekonomi Kreatif	279 M

**5 KEMENTERIAN/  
LEMBAGA DENGAN PEMANGKASAN  
TERBESAR (RUPIAH)**

	Kementerian PU	81.38 T
	Kemendikisaintek	22.54 T
	Kemenkes	19.63 T
	Kemenhub	17.87 T
	Kemenag	14.28 T

**5 KEMENTERIAN/LEMBAGA  
DENGAN PEMANGKASAN  
TERBESAR (PERSEN)**

	Otorita IKN	75.23%
	Kementerian PU	73.35%
	Kementerian Perumahan & Praswil	69.41%
	BNPT	69.16%
	Kemko Hukum HAM, Imigrasi & Pemasarakatan	66.45%

# NASIB IKN

## DI UJUNG TANDUK?

### Anggaran Diblokir Menkeu, Kepindahan ASN Mundur Lagi

Tanda tanya mengenai kelanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan mulai terjawab, meski kabar yang dibawa kurang sedap. Usai rapat dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025), Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui pembangunan IKN masih mandek karena anggaran diblokir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Hal ini berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Dalam rapat tersebut juga sempat terjadi adu mulut karena kekhawatiran akan timbul sejumlah proyek mangkrak. Mengingat anggaran Kementerian PU dipotong Rp81,38 triliun menjadi Rp29,57 triliun. Sinyal proyek IKN bak di ujung tanduk sebenarnya sudah lama terasa. Salah satunya tampak dari langkah pemerintah terus menunda rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kini diumumkan akan mulai kerja dari IKN pada April 2025, padahal rencana sebelumnya mulai Januari 2025. Untuk diketahui, kepindahan ASN ke ibu kota pengganti DKI Jakarta telah direncanakan sejak 2022. Pada rencana awal di tahun Juli 2024, diproyeksikan sebanyak 1.971 ASN. Namun kenyataannya hingga kini tahapan pemindahan ASN baru sekadar wacana. Bahkan terkait pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 akan dilakukan di Jakarta, karena Mendagri Tito Karnavian menegaskan ibu kota Indonesia belum berubah. Kalangan ekonom menyoroti program prioritas Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) 'ugal-ugalan. Tak hanya pembangunan IKN dan program infrastruktur yang beranekaragam, langkah efisiensi yang keliru berpotensi membuat lumpuh sebuah negara.

Baca Hal 11....



# Dinilai Bebani APBN, Skema Pensiun PNS Bakal Diubah

**JAKARTA**-Kenaikan jumlah penerima pensiun yang dibayar pemerintah dari waktu ke waktu dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun tengah mematangkan skema pensiun yang diterima oleh Aparat Sipil Negara (ASN) atau PNS, TNI, dan Polri.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, potensi memanfaatkan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) untuk turut patungan membiayai pensiunan ASN, TNI dan Polri.

"Dan di Undang-Undang ASN ini sudah mulai ada dana dari AIP yang bisa kita gunakan untuk membayar sebagian," kata Prima dalam Rapat Perencanaan Anggaran (RPA) dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/2/2025).

Berdasarkan data yang dipaparkan Prima, jumlah penerima pensiun yang dibayar pemerintah naik 3,1 persen atau 116 ribu jiwa setiap tahunnya. Pada 2020 sebanyak 3,26 juta jiwa penerima pensiun, naik pada 2021 menjadi 3,33 juta jiwa, 2022 3,42 juta jiwa, lalu 2023 menjadi 3,55 juta jiwa dan 2024 sebanyak 3,65 juta jiwa.

Lalu pada 2025 diproyeksi capai 3,76 juta jiwa, 2026 diproyeksi 3,87 juta jiwa, 2027 diproyeksi 4 juta jiwa, 2028 4,12 juta jiwa dan 2029 4,25 juta jiwa. Hal ini juga sejalan dengan jumlah nominal yang dibayarkan pemerintah dari tahun ke tahun.



(Ilustrasi) Pemerintah akan mengubah skema anggaran pensiunan karena bebani APBN. (dok)

Pada 2020 pemerintah menggelontorkan dana untuk pensiun Rp 125,5 triliun, naik jadi Rp 128,8 triliun pada 2021, lalu jadi Rp 133,9 triliun pada 2022, naik lagi pada 2023 jadi Rp 163,8 triliun dan pada 2024 sebesar Rp 164,4 triliun.

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan, saat ini tengah disusun formulasi yang baik soal struktur uang pensiun ini, supaya beban APBN tidak membengkak dari tahun ke tahun.

"Itu dalam rangka mengurangi, jangan sampai beban APBN itu secara berjangka panjang itu terbebani. Semua kita mencari formulasi terbaiknya, formulasi terbaik itu bagaimana negara menjalankan kewajibannya, ASN atau TNI Polri juga menjalankan kewajibannya," jelas Misbakhun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menurut dia, selama ini iuran ASN yang dipotong dari gaji setiap

bulannya itu dikelola oleh PT Taspen untuk Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian. Sedangkan uang pensiun yang akan diterima oleh ASN setiap bulannya adalah tanggungan APBN.

"Tapi bulanannya kan masih menjadi beban APBN. Nah ini harus kita reformasi, tidak boleh kemudian APBN menanggung beban tanggungan terus," jelasnya.

Misbakhun tidak menampik saat ditanya mengenai formulasi ini mempertimbangkan antara memotong dana pensiun yang diterima ASN atau menambah iuran yang dibayar ASN setiap bulannya.

"Skema ini kan lagi kita formulasikan, nah tadi ini baru pembicaraan awalnya. Di pembicaraan awalnya ini kan kita bicarakan tentang sistem pembayarannya, pembayarannya seperti apa," tutupnya. (qud, ant, rls/dya)

## REALISASI BELANJA PENSUN TERUS MENINGKAT



## Otoritas Penerbangan Saudi

# Tanggguhkan Wajib Vaksin Meningitis bagi Jamaah Umrah

**JAKARTA**-Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA) menangguhkan aturan kewajiban semua jamaah umrah dari berbagai negara harus melakukan vaksin meningitis. Sebelumnya surat edaran ini terbit pada 7 Januari 2025 dan diwacanakan berlaku Februari.

"Menunda pelaksanaan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor (2/15597) tanggal 7 Januari 2025 tentang memastikan pemegang visa umrah atau yang hendak menunaikan umrah, apa pun jenis visanya, telah menerima vaksin meningitis," demikian otoritas penerbangan Saudi.

Berikut aturan sebelumnya yang

kini ditanggguhkan.

Sirkuler GACA bernomor 15567/6 tanggal 07/01/2025 yang ditujukan kepada seluruh maskapai penerbangan yang beroperasi di wilayah Saudi itu. Jamaah wajib memastikan setiap pemegang visa umrah atau siapapun yang akan melakukan ibadah umrah dengan visa apapun, telah menerima vaksin yang disyaratkan, salah satunya vaksin meningitis.

Penumpang juga wajib memiliki sertifikat vaksin paling lambat 10 hari sebelum kedatangan dan tidak melebihi masa berlaku 3 tahun untuk vaksin tipe polysaccharide atau 5 tahun untuk vaksin tipe konjugasi.

Namun, aturan itu menulis anak dibawah usia 1 tahun dikecualikan dari kewajiban vaksin meningitis.

"Wajib memeriksa seluruh penumpang di tempat keberangkatan masing-masing untuk memastikan penumpang tersebut telah memiliki dokumen persyaratan kesehatan yang ditentukan baik oleh negara transit atau negara tujuan." Bagi yang melanggar akan berhadapan dengan hukum.

Diketahui jamaah umrah Indonesia termasuk terbanyak. Ke-



( Ilustrasi ) Aturan jamaah umrah dari berbagai negara harus melakukan vaksin meningitis ditanggguhkan. Ist

menterian Agama (Kemenag) mencatat hingga bulan September 2024, jumlah jamaah umrah Indonesia hampir mencapai 2 juta. (wid, ist, ant/dya)

# DPR Ingin RUU soal Politik Dibahas Bersama dari Awal, Pemilu 2029 Berubah?

**JAKARTA**-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas dari awal paket undang-undang (UU) terkait politik. Pembahasan tersebut di antaranya juga mengenai Pemilu dan Pilkada.

"Tadi kita sepakat, ini disusun dari awal lagi. Nah ini akan kita sampaikan ke pimpinan dan kemudian dibicarakan dengan pemerintah," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Nantinya, soal revisi UU Pilkada tidak akan lagi berstatus carry over. Sebab, kata dia, perubahannya tidak relevan lagi, lantaran banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pilkada.

Misalnya, terkait putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu yang tidak punya kursi DPRD bisa mengajukan calon kepala daerah.

"Jadi kalau misalnya kita pakai undang-undang sekarang 20 bulan, berarti sebelum 2027 undang-undangnya harus selesai," kata Doli.

Selain itu juga wacana DPRD dapat memilih kepala daerah. "Jadi latar belakang atau background pembahasan revisi undang-undang Pilkada pada saat itu tidak bisa lagi, tidak sama sekali relevan dengan yang sekarang," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pembahasan paket UU itu perlu dimatangkan sejak awal periode DPR saat ini. Hal itu untuk mencegah pembahasan menyerempet waktu Pemilu 2029.

"Nah, padahal kita mau bicara persiapan pemilu-pilkada tahun 2029 atau tahun berapa nanti setelah diundang-undang diputuskan. Jadi nggak relevan lagi. Makanya harus disusun dari awal," katanya.

Sebelumnya, Baleg juga pernah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik menjadi suatu kesatuan dalam paket omnibus law politik.

Omnibus Law politik yang diusulkan DPR memiliki cakupan lebih luas, mencakup aturan Pemilu, Pilkada, partai politik, dan hubungan eksekutif-legislatif, secara garis besar, usulan ini bertujuan mereformasi sistem politik secara keseluruhan.

## Minta Masukan Civil Society

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda memastikan evaluasi tentang Pemilu dan Pilkada 2024 akan dilakukan secara simultan atau secara bersamaan. Hal ini ia sampaikan usai rapat perihal jadwal pelantikan kepala daerah terpilih 2024.

"Terkait evaluasi tentang pemilu dan pilkada kita akan kami agendakan



berikutnya. Evaluasi ini juga nanti secara simultan dilakukan oleh pemerintah," kata Rifqi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan, DPR bersama Kemendagri dan para penyelenggara pemilu akan mendengar kajian dari civil society (masyarakat sipil), akademisi dan berbagai macam stakeholder terkait lainnya.

"Untuk nanti juga mendapatkan insight kira-kira blueprint sistem politik dan pemilu kita ke depan seperti apa," ujarnya menambahkan.

Rifqi menegaskan, hal itu juga termasuk soal pembahasan revisi undang-undang pemilu yang pihaknya belum bisa memastikan kapan akan

segera dibahas. Meski begitu, dia akan menyerahkan semua keputusannya kepada pimpinan DPR perihal pembahasannya.

"Kalau kami dari DPR, kami serahkan sepenuhnya kepada rapat pimpinan DPR, kapan itu akan diserahkan dan apakah akan diserahkan ke Komisi II DPR RI atau melalui pansus atau melalui badan legislasi, semuanya juga sebagai Ketua Komisi II saya serahkan kepada pimpinan DPR," jelas Rifqi.

Pada kesempatan yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkap sebanyak 183 petugas ad hoc KPU meninggal dunia dan 479 sakit selama gelaran Pilkada serentak 2024.

Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Mochammad Afifudin dalam rapat kerja dan RDP bersama Mendagri, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

"Dari sekian banyak petugas kita sejak Mei 2024 sampai Januari 2025 pada Pilkada 2024 ini, ada beberapa jajar yang sakit sebanyak 479 ada juga yang meninggal 183," kata Afif.

Afif menjelaskan penyebab meninggal dunia dan sakit tersebut ada yang berhubungan langsung dengan pekerjaan kecelakaan, lalu juga yang berhubungan dengan pekerjaan dan juga penyakit bawaan.

Berdasarkan data KPU, petugas yang meninggal kebanyakan berasal dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 65 anggota. Kemudian, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebanyak 30 orang yang meninggal, Sekretariat PPS 28 anggota, Pantarlih 27 anggota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 19 anggota, Linmas TPS 13 anggota, dan Sekretariat PPK 4 anggota.

Menyikapi itu, KPU turut menyampaikan bela sungkawa dan memastikan pihaknya telah memberikan santunan kecelakaan kerja, bagi jajar ad hoc sesuai dengan keputusan KPU nomor 59 tahun 2023. (din, rls, ant/dya)

## Diminta Bentuk Pansus Buat Kitab Hukum Pemilu

**PAKAR** Hukum Pemilu dari Universitas Indonesia sekaligus Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini meminta pemerintah dan DPR segera membahas UU Pemilu dan UU Pilkada yang baru dan diintegrasikan menjadi UU tentang Kitab Hukum Pemilu. Titi juga meminta DPR dapat membentuk panitia khusus untuk membahas Kitab Hukum Pemilu tersebut.

"Pembahasan bisa dilakukan melalui Pansus RUU Pemilu agar fraksi-fraksi dapat mengirimkan legislator terbaiknya yang mampu melakukan pembahasan secara komprehensif dan mendalam," saat sesi diskusi secara daring yang diselenggarakan Perludem, akhir pekan lalu.

Titi menjelaskan, berdasarkan filosofis, sosiologis, dan yuridis, telah terpenuhi prasyarat objektif untuk mencabut dan mengganti UU Pemilu dan Pilkada. Ia menilai ada sejumlah aturan yang tumpang tindih dan berbeda antara kedua UU tersebut walaupun diselenggarakan oleh penyelenggara yang sama.

Titi mendorong pembentukan UU Pemilu dan Pilkada dengan UU baru melalui model kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah UU, yakni UU tentang Pemilihan Umum yang materi muatannya dikelompokkan menjadi buku, bab, bagian, dan paragraf.

"Dengan model kodifikasi, UU tentang Pemilihan Umum yang akan dibentuk materi muatannya mengatur pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, dan penyelenggara pemilu dalam satu naskah," kata Titi.

Ia mengatakan kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah UU tentang Pemilihan Umum akan lebih relevan dalam membangun koherensi dan konsistensi pengaturan. Selain itu, kodifikasi lebih memudahkan penggunaannya sebagai instrumen pendidikan politik bagi publik untuk memahami pengaturan dan mendorong keterlibatan partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Titi mengatakan mengingat

luasnya ruang lingkup materi muatan dalam UU Pemilu, maka pembahasan RUU Pemilu harus segera dimulai agar memungkinkan pembahasan substansi secara komprehensif dan mendalam secara akademik maupun konsekuensi praktisnya ke depan.

"Selain itu, pembahasan dengan waktu yang cukup diperlukan untuk memastikan partisipasi semua pihak secara bermakna (meaningful participation)," katanya.

Ia juga memberi catatan pembahasan RUU Pemilu yang merupakan kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah harus dibarengkan waktunya dengan pembahasan Revisi UU Partai Politik agar terwujud sinkronisasi dan koherensi pengaturan di antara keduanya.

Selain itu, ia juga mengingatkan pembahasan UU Pemilu dan UU Pilkada yang baru juga segera dibahas mengingat KPU/Bawaslu akan berakhir masa jabatannya pada April 2027 dan seleksinya dimulai pada jelang akhir 2026. (wid, rls, ist/dya)

# Warning Bjorka: Ancaman Ransomware Mengintai BCA dan BSI

JAKARTA - Penjahat siber Bjorka kembali beraksi. Kali ini, Bjorka memberi pe-ringatan ke Bank BCA dan BSI untuk bersiap meng-alami kebocoran data.

Hal tersebut disampaikan Bjorka dalam sebuah cuitan di X, Rabu (5/2/2025). Dalam cuitannya, dilihat Kamis (6/2/2025) Bjorka mengungkapkan bakal ada kejutan bagi bank-bank di Indonesia.

"Sebuah kejutan bagi bank-bank di Indonesia, jika tidak merespon hal ini maka, Bank BCA akan mengalami pembobolan [data] besar-besaran," cuit Bjorka.

"Bank BSI dan BCA menjadi sasaran kelompok ransomware, dan mungkin mereka akan menyasar semua bank di Indonesia, tapi entahlah hanya mencoba menebak-nebak saja, hahaha," lanjut dia.

Dalam rangkaian cuitan selanjutnya, Bjorka mengaku bakal terus menginformasikan jika ada serangan ransomware terbaru yang mengincar kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia.

"Kami Bjorka akan selalu menginformasikan kepada Anda jika negara Anda sedang dipantau oleh Ransomware Group, dan mereka memprioritaskan perbankan. Jadi tetaplah waspada dan tetap berpegang teguh pada privasi keamanan," ujar dia.

Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, mengatakan sampai saat ini tidak ada kebocoran data nasabah.

"Sehubungan dengan informasi di media sosial yang mengklaim adanya data nasabah BCA yang tersebar, kami sampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Hera, dalam keterangan resminya.

Hera mengatakan perusahaan memastikan bahwa data nasabah tetap aman. BCA mengimbau nasabah untuk selalu berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan BCA dan berbagai modus penipuan yang bertujuan untuk mengetahui data nasabah.

"Di samping itu, BCA senantiasa melakukan pengamanan data dengan menerapkan strategi dan standar keamanan berlapis serta mitigasi risiko yang diperlukan untuk menjaga keamanan data dan transaksi digital nasabah," ujarnya.

## Netizen Duga Pengalihan Isu

Namun warganet curiga kemunculan akun ini untuk menutupi suatu isu. "Mau menutupi isu apalagi? Ibu Kota Nusantara atau IKN



(Ilustrasi) ATM bank-bank yang beroperasi di Indonesia. (Dok)

mangkrak?" kata salah satu netizen mengomentari cuitan akun X mengatasnamakan Bjorka @bjorkanesiaaa yang mengatakan bank-bank lain selain BCA akan menjadi target kelompok hacker ransomware, Kamis (6/2).

Warganet lainnya juga mengatakan tidak lagi percaya dengan isu yang dibawa oleh akun Bjorka.

Bjorka terkenal di Indonesia sejak 2022, ketika kasus Ferdy Sambo menjadi perbincangan. Pada Agustus 2022, akun dengan nama Bjorka menjual 26.730.797 data yang diklaim histori browsing pelanggan IndiHome

periode Agustus 2018 hingga November 2019 di Breached.to.

Di tengah kasus Ferdy Sambo yang terus berjalan pada 2022, Bjorka kembali menjual 1,3 miliar data simcard ponsel masyarakat Indonesia yang diklaim dari Kominfo pada September 2022.

Kasus Ferdy Sambo yakni polisi tembak-menembak di rumah dinas Kadiv Propam Polri di Jalan Duren Tiga No 46, Jakarta Selatan terbongkar pada Juli 2022. Sidang berlangsung selama Agustus - November 2022. (wid, bis, ist, x/dya)

## RUNUTAN KEMUNCULAN BJORKA DI TENGAH ISU YANG MENJADI TREN:

-  **21 Agustus 2022:** Menjual 26,7 juta data IndiHome (KTP, email, ponsel, dll).
-  **1 September 2022:** Menjual 1,3 miliar data simcard (NIK, nomor telepon, dll).
-  **6 September 2022:** Menjual 105 juta data pemilu (NIK, KK, dll).
-  **10 September 2022:** Meretas surat menyurat Presiden Jokowi (679.180 dokumen).
-  **10 September 2022:** Mengunggah data pribadi Johnny G. Plate.
-  **11 September 2022:** Mengunggah data pribadi Erick Thohir.
-  **11 September 2022:** Mengunggah data pribadi Denny Siregar.
-  **12 September 2022:** Mengunggah data pribadi Luhut B. Pandjaitan.
-  **13 September 2022:** Mengunggah data pribadi Puan Maharani.
-  **10 November 2022:** Mengancam unggah data MyPertamina.
-  **12 Maret 2023:** Menjual data BPJS Ketenagakerjaan.
-  **15 Maret 2023:** Mengunggah data Rafael Alun Trisambodo.
-  **Awal September 2024:** Membocorkan data pejabat (Jokowi, Gibran, Kaesang, dll).

## Menkomdigi Ungkap Badan Perlindungan Data Segera Rampung

**MENTERI** Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berharap Badan Perlindungan Data akan segera rampung dalam beberapa bulan mendatang.

Ia mengatakan pembentukan badan untuk memperkuat perlindungan data pribadi ini sudah dilaporkan juga kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kita harus memastikan bahwa ruang digital Indonesia adalah ruang yang aman untuk semua. Kita memperkuat perlindungan data pribadi. Kami sudah melaporkan ke Presiden mudah-mudahan Badan Perlindungan Data ini bisa kita lakukan dalam beberapa bulan ke depan, memerangi konten negatif dan menegakkan aturan dengan tegas," ujar Meutya dikutip, Kamis (6/2/2025).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur "lembaga" yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut.

UU PDP ini disahkan pada 17 Oktober 2022, dengan masa transisi selama dua tahun. Artinya pelaksanaan semua ketentuan termasuk pembentukan lembaga pengawas seharusnya selesai paling lambat pada 17 Oktober 2024.

Pada November, Meutya menjelaskan lembaga pengawas PDP atau Badan Perlindungan Data ini melibatkan sejumlah kementerian. Kemenko Polkam disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung (person in charge/PIC) dalam proses ini. Selain itu, Kemenko Polkam juga menjadi pimpinan dalam pembentukan

"Lead-nya ada di Kemenko Polkam," tutur Meutya kala itu.

Lebih lanjut, Meutya menyinggung soal Badan Perlindungan Data ketika memaparkan pilar-pilar yang menjadi pondasi menghadapi tantangan keamanan digital Tanah Air. Badan Perlindungan Data sendiri berada di bawah pilar kelima tentang ruang digital yang berdaulat.

Sementara itu, pilar pertama

menyoroti infrastruktur digital yang berfungsi sebagai enabler. Pada bagian ini, pemerintah ingin memastikan setiap masyarakat dari Sabang sampai Merauke bisa memiliki akses terhadap teknologi berkualitas dengan harga terjangkau.

Pilar kedua menyoroti pemerintah digital. Salah satu fokusnya adalah memperkuat perlindungan data dalam layanan digital.

Pilar ketiga menyoroti ekosistem digital. Di sektor ini, pemerintah ingin membangun regulasi yang mendorong pertumbuhan inovator teknologi, tetapi dengan tetap melindungi pengguna.

Pilar keempat menyoroti masyarakat digital. Di sini, Meutya menjelaskan literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan internet, tetapi juga bisa memahami risiko serta melindungi diri di ruang digital.

"Setiap orang harus menjadi benteng bagi dirinya sendiri. Artinya meskipun ada regulasi, tetapi setiap orang harus menjadi benteng bagi dirinya sendiri," tuturnya. (cnn, ist/dya)

# Picu Sedimentasi, KEK Lido Besutan Hary Tanoe dan Donald Trump **Disegel**



Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) segel Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido. Foto: KLH

**JAKARTA**-Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel dan menghentikan pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, Jawa Barat. Keputusan ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran, termasuk pembangunan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan.

Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Gakkum LH, Ardyanto Nugroho menjelaskan hasil verifikasi lapangan mengungkap perbedaan signifikan antara dokumen lingkungan yang telah disetujui dengan realisasi konstruksi di KEK Lido.

"Kegiatan pembangunan yang berlangsung tidak mengelola air limpasan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan sedimentasi yang mengancam ekosistem di sekitar danau. Ketidaksiharian antara rencana lingkungan dan pelaksanaan fisik menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam," kata Ardyanto dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).

Diketahui, proyek KEK Lido ini milik Hary Tanoe dan Donald Trump yang telah dikerjakan sejak tahun 2022 lalu. KEK Lido ini seluas 1.040 hektare dengan target investasi mencapai Rp 33,4 triliun hingga 2030.

Penyegelan ini dilakukan usai Menteri LH, Hanif Faisol Nurrofiq sidak mendadak di KEK Lido pada 1 Februari 2025 sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pendangkalan Danau Lido.

Keputusan penyegelan itu diambil setelah tim pengawasan Gakkum LH melakukan verifikasi lapangan dan menemukan sejumlah pelanggaran.

Di antaranya aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan serta

pembukaan lahan yang diduga menyebabkan pendangkalan Danau Lido di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hanif menjelaskan bahwa hasil analisis citra satelit menunjukkan adanya pendangkalan dan penyempitan luas Danau Lido yang salah satunya berasal dari aktivitas pembukaan lahan KEK Lido.

"PT MNC Land Lido diindikasikan tidak melakukan pengelolaan air larian hujan (runoff) dengan baik. Akibatnya, sedimen dari areal bukaan lahan terbawa ke Hulu Danau Lido, menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan," ujar Hanif.

Penghentian kegiatan pembangunan KEK Lido dipimpin oleh Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Gakkum LH, Ardyanto Nugroho.

Tim pengawas telah memasang segel Pengawas LH serta papan pemberitahuan penghentian kegiatan, yang kini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.

Ardyanto menegaskan bahwa hasil verifikasi lapangan mengungkap perbedaan signifikan antara dokumen lingkungan yang telah disetujui dengan realisasi konstruksi di KEK Lido.

"Kegiatan pembangunan yang berlangsung tidak mengelola air limpasan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan sedimentasi yang mengancam ekosistem di sekitar danau," ucapnya.

"Ketidaksiharian antara rencana lingkungan dan pelaksanaan fisik menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam," sambungnya.

## 2 Ha Air Danau Lido Hilang

Lebih lanjut, berdasarkan pengamatan satelit, luas badan air Danau Lido telah mengalami penyempitan drastis, dari alokasi semula sebesar 24 hektar menjadi hanya 12 hektar, dengan kehilangan sekitar 2 hektar badan air.

Atas temuan ini, Ardyanto menegaskan bahwa pihak pengelola wajib segera memenuhi seluruh perizinan yang belum terpenuhi.

Pemerintah akan menerapkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, termasuk penyegelan kawasan dan denda keterlambatan, yang akan disesuaikan dengan kecepatan pemenuhan kewajiban oleh pihak pengembang.

Sebagai bagian dari langkah pembuktian ilmiah terkait pencemaran di Danau Lido, tim pengawas telah mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi.

Saat ini, tim masih menunggu hasil uji laboratorium untuk menentukan langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang berdampak pada ekosistem serta masyarakat sekitar.

KEK Lido, yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Maret 2023. Peresmian ini menjadi langkah pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata. (din, bis, rls, ant/dya)

## TENTANG KEK LIDO

- Terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Maret 2023.
- KEK Lido ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2021 dan memiliki luas sekitar 1.040 hektare dengan nilai investasi Rp33,4 triliun hingga 2030 mendatang.
- KEK Lido sebagai kawasan dengan kegiatan utama pariwisata yang dioperasikan oleh PT MNC Land Tbk yang berpengalaman dalam bidang industri kreatif, entertainment dan pariwisata.
- Kawasan ini dirancang sebagai destinasi pariwisata terintegrasi dengan berbagai fasilitas modern, termasuk taman hiburan (theme park), studio film (movieland), taman air (water park), dan pusat teknologi (techno park). Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru.
- Pengembangan KEK Lido diharapkan dapat menyerap investasi hingga Rp40 triliun dan menciptakan sekitar 30 ribu lapangan kerja.
- Hingga Maret 2023, total realisasi investasi di KEK Lido tercatat telah mencapai Rp3,4 triliun.
- Selain itu, KEK Lido sempat menjadi perbincangan karena adanya rencana investasi dari Trump Organization.

# Parkir Pasar Klojen Picu Kemacetan, Dishub Siapkan Penataan



Pasar Klojen ini sekarang jadi destinasi kuliner baru tapi penataan parkir masih kurang. Memang di sana kan tempat terbatas sekali, mudah-mudahan akan kita diskusi dan rapatkan dengan asisten,"

**WIDJAJA SALEH PUTRA**  
Kepala Dishub Kota Malang

**MALANG** - Meningkatnya jumlah pengunjung di Pasar Klojen membuat arus lalu lintas di sekitarnya kerap menimbulkan kemacetan. Salah satu penyebab utama yakni parkir kendaraan yang belum tertata dengan baik, terutama di tepi jalan.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang berencana melakukan penataan ulang sistem parkir di kawasan tersebut. "Pasar Klojen ini sekarang jadi destinasi kuliner baru tapi penataan parkir masih kurang. Memang di sana kan tempat terbatas sekali, mudah-mudahan akan kita diskusi dan rapatkan dengan asisten," ujar Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, Kamis (6/2/2025).

Pantauan di lokasi menunjukkan, titik parkir di sekitar Pasar Klojen masih menggunakan tepi jalan yang terbatas. Hal ini membuat aktivitas lalu lintas terganggu, baik saat kendaraan masuk maupun keluar area parkir. Keberadaan kendaraan yang parkir sembarangan semakin memperburuk kemacetan yang terjadi di area tersebut.

Pria yang akrab disapa Jaya ini menambahkan, langkah penataan

parkir harus melibatkan seluruh pihak, termasuk kepolisian dan dinas terkait lainnya. Salah satu usulan yang tengah dipertimbangkan yaitu pengaturan agar pengunjung dapat lebih nyaman berjalan kaki dan tidak terganggu oleh kendaraan yang parkir sembarangan.

"Kami juga akan berkonsultasi dengan Polresta untuk mencari masukan, karena yang penting adalah pengunjung bisa dan mau berjalan kaki. Harapannya, penataan ini bisa dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak terkait," imbuhnya.

Selain masalah parkir, keberadaan trotoar di kawasan Pasar Klojen juga menjadi perhatian. Trotoar yang seharusnya dipergunakan bagi pejalan kaki, sering kali digunakan sebagai tempat nongkrong, membuat pejalan kaki terpaksa berjalan di tepi jalan.



Kondisi parkir tepi jalan di depan Pasar Klojen Kota Malang, Kamis (6/2/2025). (Santi/Lenteratoday)

"Hal ini meningkatkan risiko keselamatan, karena pejalan kaki harus bersaing dengan kendaraan yang sedang melintas atau parkir di tepi jalan," terangnya.

Tidak hanya itu, Jaya juga menyoroti beberapa kendaraan yang masih menurunkan penumpang tanpa memarkirkan kendaraan di tempat yang semestinya. (Santi/Dya)

## Hasil Pemeriksaan Sementara, Kadindik Kabupaten Malang Sebut Pegawainya Tak Terbukti Lakukan Pungli



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji. (Santi/Lenteratoday)

telah melakukan penelusuran terhadap laporan yang menyebut adanya pungli terhadap sejumlah kepala sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Malang. Namun, hingga saat ini, ia menyatakan tidak ditemukan bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan anak buahnya dalam praktik tersebut.

"Ya, itu kan sudah ditangani oleh Inspektorat. Tetapi dari hasil pantauan saya sementara ini, ya tidak terbukti. Belum terbukti," ujar Suwadji, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Kamis (6/2/2025).

**MALANG** - Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Malang, Suwadji, menegaskan dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret salah satu pegawainya hingga saat ini belum terbukti. Hal itu disampaikan Suwadji berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Malang.

Menurut Suwadji, Inspektorat

Suwadji, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Kamis (6/2/2025).

Ditambahkannya, seluruh kepala sekolah yang disebut-sebut menjadi korban pungli telah memberikan pernyataan resmi yang menyangkal adanya permintaan setoran. Bahkan, sambung Suwadji, para kepala sekolah tersebut telah menandatangani surat pernyataan yang kemudian telah

dikroscek oleh Inspektorat.

"Buktinya ya kepala sekolah semuanya menyangkal. Mereka tidak merasa dimintai uang, dan ada surat pernyataan mereka yang diperiksa oleh Inspektorat. Kalau mereka berani menandatangani pernyataan itu, berarti kam memang tidak ada permintaan setoran," tegasnya.

Meski demikian, Suwadji menegaskan pihaknya tetap akan melakukan pengawasan terhadap pegawai yang diduga terlibat. Meningat pemeriksaan masih berlanjut, jika nantinya ditemukan bukti yang mengarah pada pelanggaran, Suwadji memastikan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Malang untuk menentukan sanksi.

Selain dugaan pungli, nama pegawai yang sama juga terseret dalam isu pengaturan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Dindik Kabupaten Malang. Dalam hal ini, Kadindik Suwadji kembali membantah adanya intervensi dalam proyek tersebut.

Ia menjelaskan proyek yang didanai oleh DAK bersifat swakelola, di mana kepala sekolah dan komite

sekolah memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaannya. Adapun keberadaan konsultan perencana memang diperlukan, tetapi penunjukannya dilakukan secara langsung oleh pihak sekolah.

Untuk diketahui, dalam pemberitaan sebelumnya Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, menyebut pihaknya telah menerima pengaduan dari sejumlah kepala SD negeri yang merasa dimintai setoran oleh oknum pegawai Dindik berinisial LS.

Pusdek bahkan telah bersurat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pungli tersebut. Surat balasan dari Dindik yang diterima Pusdek pada 21 Januari 2025 menyatakan bahwa kasus ini tengah ditindaklanjuti bersama Inspektorat.

"Berdasarkan pengaduan yang kami terima, ada dugaan bahwa oknum Kabid SD meminta setoran dana Rp 1 juta hingga Rp 1,6 juta kepada kepala sekolah. Setidaknya ada puluhan kepala sekolah yang mengaku telah memberikan setoran tersebut," ungkap Asep. (Santi/Dya)

# Susul AS, Argentina Resmi Keluar dari WHO

**BUENOS AIRES** - Argentina mengumumkan bakal menarik diri dari Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), kata Presiden Javier Milei pada Rabu (5/2/2025), mengikuti jejak Amerika Serikat.

Juru bicara Pemerintah Argentina Manuel Adorni mengatakan, keputusan Milei berdasarkan perbedaan mendalam mengenai manajemen kesehatan, terutama selama pandemi Covid-19.

Ia menambahkan, Argentina tidak akan membiarkan badan internasional mencampuri kedaulatan negaranya.

Dengan keluar dari WHO, Argentina akan memiliki fleksibilitas lebih besar untuk menerapkan kebijakan sesuai konteks lokal, imbuh Adorni.

"(Sambil memastikan) ketersediaan sumber daya lebih besar," lanjutnya, dikutip dari kantor berita AFP, dikutip Kamis (6/2/2025).

Milei, yang menyatakan diri sebagai anarko-kapitalis, adalah penggemar berat Presiden AS Donald Trump.

Trump beberapa jam usai pelantikannya pada 20 Januari 2025 menandatangani beberapa perintah eksekutif, salah satunya adalah menarik AS keluar dari WHO, juga dengan alasan penanganan pandemi Covid-19.

Amerika adalah donatur terbesar bagi badan PBB yang berbasis di Jenewa, Swiss, tersebut.

Namun, menurut Trump, WHO merampok AS. Keluarnya Amerika dapat menyebabkan proyek-proyek kesehatan global kekurangan dana.

Javier Milei sejak menjadi orang nomor satu di Argentina pada Desember 2023 memangkas anggaran belanja publik besar-besaran.

Ia berjanji mempertahankan margin anggaran nol setelah bertahun-tahun defisit dana berlebihan.

Kebijakan penghematannya diperkirakan membuat jutaan orang jatuh miskin, tetapi Argentina juga mencatat surplus perdagangan terbesar pada 2024, sebagian karena kemerosotan impor dan belanja.

Adapun Milei adalah pemimpin asing pertama yang mengunjungi Trump di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida, setelah kemenangan Partai Republik dalam pemilihan presiden AS pada November 2024.

## WHO Tidak Independen

Argentina keluar dari WHO karena urangnya independensi dalam



Sebuah pesawat yang membawa bantuan medis dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tiba di Bandara Internasional Rafik Hariri di ibu kota, Beirut, Lebanon, pada 4 Oktober 2024 [Anadolu]

menghadapi pengaruh politik beberapa negara.

Argentina mengklaim dengan keluarnya negara tersebut akan memberikan "fleksibilitas yang lebih besar untuk menerapkan kebijakan" demi kepentingan Argentina dan "ketersediaan sumber daya yang lebih besar."

"Hal ini menegaskan kembali jalan kita menuju negara yang berdaulat juga dalam masalah kesehatan,"

tambah Adorni.

Alasan yang disampaikan Adorni pada beberapa poin serupa dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Donald Trump menyebut bahwa WHO tidak transparan dan terlalu dipengaruhi oleh negara-negara tertentu, terutama China.

Meski ada alasan lain dimana Trump merasa beban finansial AS yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain sebagai anggota WHO.

Langkah ini dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap cara WHO menangani pandemi COVID-19 yang menurut Trump merugikan AS.

Diketahui bila Argentina keluar dari WHO, hal tersebut dirasa negara asal Messi itu tidak mengganggu sistem kesehatan mereka. Apalagi selama ini mereka tidak mendapatkan bantuan dana dari WHO.

"Argentina tidak menerima dana dari WHO, jadi tindakan ini tidak membuat Argentina kehilangan dana," kata Adorni.

Selain itu Data WHO menunjukkan Argentina menyumbang sekitar USD8,75 juta dalam bentuk iuran keanggotaan kepada organisasi tersebut sepanjang tahun 2022 dan 2023.

Angka tersebut sekitar 0,11 persen dari total anggaran seperti mengutip Channel News Asia.

Argentina dijadwalkan menyumbang USD8,25 juta untuk siklus dua tahun 2024/25. (AFP,ist/nei)

## Warga Gaza Tolak Relokasi yang Direncanakan Trump

**WARGA** Palestina di Jalur Gaza menegaskan bahwa mereka tidak akan meninggalkan tanahnya meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan relokasi ke negara lain.

Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Kamis (6/2/2025), Trump yang didampingi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil kepemilikan jangka panjang atas Gaza.

Ia juga kembali menyampaikan gagasan agar warga Gaza direlokasi ke Yordania atau Mesir.

Namun, bagi warga Gaza, meninggalkan tanah kelahiran bukanlah pilihan. "Kami hanya punya satu pilihan: hidup atau mati di sini," kata Ahmed Halasa (41), warga Kota Gaza, di tengah reruntuhan bangunan yang hancur akibat perang.

Sejak akhir Januari, ratusan ribu warga Gaza utara telah kembali ke wilayah mereka yang porak-poranda akibat serangan. Mereka kembali meskipun infrastruktur hancur dan pasokan kebutuhan dasar terbatas.

"Kami kembali meskipun kehancuran besar terjadi, meskipun tidak ada infrastruktur, air, atau kebutuhan dasar lainnya," ujar Ahmed Al Minawi (24), yang kembali ke Kota Gaza bersama keluarganya.

"Kami kembali karena kami

dengan tegas menolak pengusiran."

Banyak warga yang mendapati rumah mereka telah rata dengan tanah. Sebagian besar kini bertahan dengan mendirikan tenda di antara reruntuhan.

Badri Akram (36) menegaskan sikapnya terhadap usulan Trump. "Lihatlah, rumah saya sudah hancur, tapi saya masih bisa tidur di atas puing-puing ini," katanya.

Trump juga sempat mengusulkan pembangunan kembali Gaza menjadi "Riviera di Timur Tengah".

Namun, bagi warga Palestina, kekhawatiran terbesar adalah ancaman pengusiran paksa dari tanah mereka.

Sejumlah warga membandingkan wacana ini dengan peristiwa "Nakba" atau "malapetaka" pada 1948, ketika ratusan ribu warga Palestina dipaksa meninggalkan tanah mereka setelah berdirinya Israel.

"Kami melawan pengusiran sejak 1948," tegas Minawi.

Badan Pangan Dunia PBB (WFP) mencatat bahwa dalam beberapa



Warga Palestina mengibarkan tanda kemenangan saat kembali ke Rafah, Gaza selatan, pada 19 Januari 2025, setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas diharapkan dilaksanakan.

hari terakhir, sekitar 500.000 warga telah kembali ke Gaza utara.

Pada Rabu (5/2/2025), aktivitas di Kota Gaza kembali tampak dengan pedagang berjualan, kendaraan berlalu-lalang, dan warga berjalan di antara puing-puing.

Sementara itu, penolakan terhadap gagasan relokasi juga datang dari warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel.

"Kami tidak akan meninggalkan tanah kami, bahkan jika mereka membawa semua tank di dunia," kata Umm Muhammad Al Baytar, warga Ramallah.

Bahkan serangan udara pun tak bisa memaksa mereka pergi," tambahnya. (Anadolu,AFP,ist/nei)

# Roti Sourdough

## Pilihan Sehat untuk Makanan Sehat



**ROTI** sourdough menjadi pilihan favorit bagi pecinta makanan sehat karena rasanya yang lezat dan manfaatnya yang beragam, termasuk memperlancar pencernaan dan mengontrol kadar gula darah.

Roti sourdough dihasilkan melalui proses fermentasi alami yang memanfaatkan ragi liar dan bakteri asam laktat untuk mengembangkan adonan.

Proses ini membuat adonan mengembang secara alami dan menghasilkan roti dengan tekstur yang kenyal, rasa yang unik, serta lebih sehat dan bergizi.

Daripada roti biasa, proses pembuatan roti sourdough memang lebih memakan waktu. Meski begitu, proses fermentasi ini membuat roti sourdough menjadi tidak mudah basi serta mengandung lebih banyak nutrisi. Roti sourdough pun umumnya lebih rendah gluten dan memiliki nilai indeks glikemik yang rendah.

### Roti Sourdough dan Berbagai Manfaatnya

Melihat berbagai kandungan nutrisi di dalamnya, roti sourdough memiliki segudang manfaat yang baik untuk kesehatan, di antaranya:

#### 1. Lebih mudah dicerna

Selama proses fermentasi adonan roti sourdough, ragi liar dan bakteri asam laktat akan memecah sebagian gluten dalam tepung.

Nah, hal ini membuat roti sourdough memiliki kandungan gluten yang rendah sehingga lebih mudah dicerna, terutama bagi orang dengan intoleransi gluten, atau penderita gangguan pencernaan, seperti irritable bowel syndrome (IBS).

Selain itu, proses fermentasi ini juga mengurangi jumlah asam fitat yang dapat menghambat penyerapan mineral. Dengan begitu, keseluruhan nutrisi dalam roti sourdough, seperti kalsium dan zat besi, lebih mudah diserap tubuh.

#### 2. Menjaga kesehatan pencernaan

Proses fermentasi juga meningkatkan kandungan prebiotik pada roti sourdough. Prebiotik bermanfaat untuk meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus, sehingga kesehatan pencernaan lebih terjaga. Selain itu, kand

ungan serat pada roti sourdough juga turut melancarkan proses pencernaan. Untuk memaksimalkan manfaatnya yang satu ini, konsumsilah roti sourdough yang terbuat dari biji-bijian utuh karena mengandung serat yang lebih tinggi.

#### 3. Membantu mengontrol kadar gula darah

Manfaat roti sourdough berikutnya adalah membantu mengontrol kadar gula darah. Lagi-lagi hal ini berkat proses fermentasi yang mampu menurunkan indeks glikemik pada roti sourdough.

Saat roti sourdough dikonsumsi, proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menjadi lebih lambat. Inilah yang membuat roti sourdough tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, tidak seperti roti tawar biasa atau roti manis.

Oleh karena itu, roti sourdough cocok dikonsumsi untuk mencegah diabetes tipe 2. Sementara bagi pasien diabetes, roti ini bisa menjadi makanan sehat sehari-hari yang baik untuk kesehatan tubuh.

#### 4. Membantu mengontrol berat badan

Roti sourdough merupakan salah satu jenis roti yang cocok dikonsumsi untuk diet. Ini karena roti sehat ini kaya akan vitamin, mineral, dan karbohidrat kompleks.

Aneka nutrisi ini menjadikan roti sourdough bisa membuat perut kenyang lebih lama, sekaligus mencukupi kebutuhan tubuh akan kalori. Dengan begitu, Anda bisa lebih mudah mengontrol nafsu dan porsi makan, sehingga berat badan pun berkurang.

#### 5. Mencegah penyakit jantung

Roti sourdough juga bermanfaat untuk mencegah berbagai penyakit serius. Berkat kadar serat, karbohidrat kompleks, serta aneka vitamin dan

mineralnya, roti sourdough baik dikonsumsi untuk mencegah penyakit jantung dan mengontrol kadar kolesterol. Selain itu, roti sourdough juga mengandung antioksidan dan kalium yang dapat mengontrol tekanan darah.

Namun, manfaat roti sourdough ini juga perlu diimbangi dengan olahraga rutin dan pola makan sehat, khususnya diet rendah garam, lemak, dan gula.

#### 6. Mencegah anemia

Daripada roti tawar biasa, roti sourdough mengandung lebih banyak zat besi dan asam folat. Kandungan nutrisi ini berperan penting dalam menghasilkan sel-sel darah merah, sehingga bisa membantu mencegah dan mengatasi anemia.

#### Sejarah roti sourdough

Meski baru dikenal di Indonesia, tapi sebenarnya roti sourdough sudah ada sejak ribuan tahun lalu, lho! Sayangnya, penemunya gak diketahui pasti. Namun, sekitar 6 ribu tahun lalu, ada pembuat roti yang menemukan campuran tepung dan air tergeletak hingga terfermentasi.

Kemudian, sang pembuat mencampurkan adonan roti dengan hasil temuannya. Siapa sangka, roti yang dihasilkan mempunyai rasa serta aroma yang lezat. Tekstur rotinya pun cenderung kenyal dan mengembang.

Dalam versi lain, roti sourdough ditemukan pada zaman Mesir Kuno, sekitar 1.500 Masehi. Ini diawali dari seorang tukang roti yang lupa dan tanpa sengaja meninggalkan adonan roti. Hingga akhirnya, roti ini mengembang dengan sendirinya. Dulunya, roti sourdough dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Namun, popularitasnya kian meluas hingga menyebar sampai ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. (ne,ist/dya)



# Mobil Amfibi Jetour Zongheng Bisa Jalan di Darat dan Air!

**INDUSTRI** otomotif global sedang mengalami perubahan besar, dan merek-merek Tiongkok seperti Jetour Auto memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan kendaraan listrik terbaru mereka, yaitu seri Jetour Zongheng.

Diklaim bahwa ini bukan hanya peluncuran rangkaian produk baru, tetapi juga deklarasi tentang terobosan ke atas merek-merek Tiongkok, yang menandai dimulainya perjalanan baru bagi Jetour di pasar off-road mewah.

Produsen kendaraan asal China, Jetour mengenalkan tiga jenis sport utility vehicle (SUV) offroad di kelas premium bernama Zongheng yang akan diluncurkan pada kuartal ketiga 2025.

Melansir laman resmi Jetour China pada Sabtu, seri Zongheng yang dikenalkan Jetour meliputi SUV G700, F700 pickup dan G900 crossover. Sebagai rangkaian produk baru untuk pasar global, Jetour Zongheng digadang tidak hanya mengisi celah merek-merek Tiongkok di pasar off-road mewah dunia, tetapi juga menghadirkan gaya hidup off-road mewah baru.

Perusahaan yang berbasis di Anhui itu menyediakan lini produk SUV mewah guna menjawab naiknya permintaan konsumen setelah mengalami peningkatan penjualan di China.

SUV mewah Zongheng akan memakai dua varian mesin yakni CDM-O dan CEM-O. Mesin CDM-O yang berjenis parallel hybrid menggunakan mesin bensin turbocharged 2L, bertenaga 55 kW (208 hp).

Mesin CDM-O dipasangkan dengan drivetrain DHT bertenaga 210 kW (282 hp). Mobil itu juga memakai motor listrik 300 kW pada as roda belakang dengan tenaga 300 kW (402 hp).

Mesin jenis tersebut akan diadopsi oleh dua varian Jetour yakni Zongheng G700 dan F700 pickup.

Adapun mesin kedua CEM-O menggunakan generator 2L bertenaga 155 kW yang menyalurkan daya ke baterai dan motor listrik. Powertrain CEM-O menggunakan empat motor listrik dengan daya maksimal mencapai 1.200 kW (1.572 hp).

Kedua mesin itu, CDM-O dan CEM-O, mengadopsi sistem tegangan tinggi 800V dengan pengisian daya 6C yang bisa mentransfer daya listrik dari 20 persen hingga 80 persen cuma dalam enam menit.

## Perbedaan Zongheng G700, F700 dan G900

Model pertama

Jetour Zongheng adalah SUV off-road G700. Mobil itu sebenarnya sudah pernah ditampilkan dalam pameran namun masih berbentuk mobil konsep T5.

G700 memiliki garis desain yang gagah dengan atap yang tinggi. Mobil ini menggunakan body-on-frame sepanjang 5,1 meter dengan ground clearance (jarak ketinggian bodi ke tanah) yang bisa disesuaikan dari 150 mm hingga 350 mm karena menggunakan suspensi udara.

Mobil ini memuat enam penumpang dengan konfigurasi tempat duduk 2+2+2 (tiga baris kursi).

Konfigurasi tempat duduk itu membuat G700 memiliki banyak ruang di konsol tengah untuk

menempatkan berbagai fitur teknologi maupun penunjang kenyamanan.

Mobil kedua dari seri Zongheng adalah F700 pickup yang menggunakan platform G700.

Namun sebagai pembeda, F700 pickup tidak menggunakan kaca spion konvensional melainkan sebuah panel dengan kamera di sisi kanan dan kiri. F700 pickup juga memiliki tampilan depan yang lebih maskulin dengan desain lampu yang lebih lebar dan tajam.

Adapun mobil ketiga seri Zongheng adalah G900 yang berdesain crossover. G900 memiliki kemampuan unik, yakni bisa "berenang" di air selama 40 menit dengan kecepatan 8,5 km/jam. [nei,ist/dya](#)



HARIAN  
**LENTERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"  
**PIMPINAN PERUSAHAAN** TARMUJI TALMACSI  
**OMBUDSMAN** SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
**PENANGGUNG JAWAB** ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
**PIMPINAN REDAKSI** ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
**REDAKTUR PELAKSANA** AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
**REDAKTUR** LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
[www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com)  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**BIRO: SURABAYA:** YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO ( SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN | TRENGGALEK: TINA W | NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | DKI JAKARTA: FUAD HASSAN | LOMBOK BARAT: MUHAYYAN | PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI**

**MEDIA TERVERIFIKASI**

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH  
**DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# Eksotisme Santorini

## Destinasi Wisata Idaman

PULAU Santorini di Yunani mengalami serangkaian gempa yang intens, dengan lebih dari 200 kali gempa dalam 48 jam terakhir. Gempa terkuat berkekuatan 4,6 SR dan berpusat di laut antara Santorini dan Amorgos.

Sebagai upaya mitigasi, pemerintah Yunani telah memberikan edaran untuk menutup sementara sekolah-sekolah dari Sabtu hingga Senin kemarin. Pemerintah Yunani juga mendirikan tenda dan tim penyelamat mulai dikirimkan ke Santorini.

Santorini adalah satu pulau paling ikonik di Yunani, menawarkan berbagai destinasi wisata yang memadukan keindahan alam, sejarah yang kaya, serta budaya khas Mediterania. Dari desa-desa yang menawan, pantai eksotis, situs arkeologi, hingga pengalaman kuliner yang autentik, berikut adalah destinasi wisata terbaik di Santorini yang wajib dikunjungi.

### 1. Desa Oia

Oia adalah sebuah desa kecil di pulau Thira, Kepulauan Kyklades, Yunani. Desa yang sebelumnya dikenal dengan nama Apano Meria ini merupakan salah satu desa paling ikonik di dunia karena rumah-rumah penduduknya. Desa Oia memiliki kaitan erat dengan sejarah maritim Yunani karena letaknya yang strategis, menjadi salah satu destinasi pelayaran yang berjaya pada abad 19 hingga 20. Pada awalnya, sebagian besar penduduk desa Oia adalah pelaut.

Rumah-rumah di desa Oia merupakan hasil pahatan batu kapur sehingga didominasi warna putih dan biru yang sangat selaras dengan Laut Mediterania. Pemandangan ini tentu sangat menarik dan menginspirasi bagi siapapun yang melihatnya. Desa Oia adalah destinasi paling terkenal di Santorini, terutama karena pemandangan matahari terbenamnya yang spektakuler.

Terletak di bagian utara pulau, desa ini dipenuhi dengan rumah-rumah bercat putih dengan kubah biru khas Yunani yang

bertengger di tebing tinggi. Jalan-jalan sempit yang dipenuhi galeri seni, butik, dan restoran mewah menjadikan Oia tempat sempurna untuk menikmati pesona Santorini.

### 2. Kota Fira

Fira, sebuah kota indah yang terletak di Pulau Santorini, Yunani. Destinasi ini menawarkan keindahan yang memukau bagi siapa saja yang mengunjunginya. Sebagai ibu kota Santorini, Fira adalah pusat kehidupan malam, perbelanjaan, dan kuliner di pulau ini. Terletak di tebing kaldera, kota ini menawarkan pemandangan Laut Aegea yang menakjubkan serta arsitektur khas Cycladic.

Kota ini menawarkan panorama spektakuler dari tebing tinggi yang langsung menghadap kaldera. Ada pula kereta gantung yang menghubungkan pelabuhan lama dengan kota, memberikan perjalanan singkat dengan pemandangan luar biasa. Keindahan arsitektur ini menjadi ciri khas Fira dan menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang datang ke Santorini.

Tak hanya itu, kota Fira juga dikelilingi oleh pemandangan yang indah. Dari tepi tebing di kota, pengunjung dapat menikmati pemandangan laut yang luas dan spektakuler. Pemandangan ini akan memukau siapa saja yang melihatnya, dan menjadi pengalaman yang tak terlupakan.

### 3. Kota Kuno Akrotiri

Situs arkeologi Akrotiri sering disebut sebagai "Pompeii dari Laut Aegea" karena kota ini terkubur akibat letusan gunung berapi sekitar 1600 SM. Penggalian telah mengungkap kan peradaban Minoan yang maju dengan sistem drainase, bangunan

bertingkat, dan seni mural yang kaya warna. Salah satu daya tarik kota ini adalah lukisan dinding yang menggambarkan kehidupan masyarakat zaman dahulu.

### 4. Pantai Merah

Pantai Merah merupakan salah satu pantai paling unik di Santorini dengan pasir berwarna merah yang kontras dengan air laut biru jernih. Terletak di dekat Akrotiri, pantai ini dikelilingi oleh tebing-tebing vulkanik yang menciptakan pemandangan dramatis. Air jernih pantai ini memungkinkan wisatawan menikmati keindahan bawah laut. Selain itu, tebing merah yang membentuk lanskap eksotis menjadi fenomena yang tidak boleh dilewatkan ketika berkunjung ke Santorini.

Warna merah di garis pantai ini terjadi karena fenomena alam, yaitu pecahan batu lava yang mengandung zat besi dari letusan gunung berapi, sekitar 3.000 tahun silam di Santorini. Untuk sampai ke tempat ini, pengunjung harus melewati jalanan terjal dari atas tebing sampai ke bawah. Meski rutanya cukup menantang, namun rasa capek di perjalanan akan langsung terbayar dengan keindahan Pantai Pasir Merah yang sangat memukau.

### 5. Pantai Perissa dan Perivolos

Pantai ini berlokasi di lereng Gunung Mesa Vouno. Bagi pecinta pantai berpasir hitam vulkanik, Perissa dan Perivolos adalah destinasi terbaik. Kedua pantai ini menawarkan berbagai fasilitas wisata seperti bar

pantai, restoran, serta aktivitas air seperti jet ski dan parasailing.

### 6. Pyrgos

Pyrgos adalah desa tradisional yang menawarkan pemandangan 360 derajat dari seluruh pulau karena letaknya di titik tertinggi Santorini. Tempat ini lebih tenang dibandingkan Oia atau Fira, tetapi memiliki daya tarik tersendiri dengan jalan berbatu yang berkelok, rumah-rumah batu, serta gereja-gereja kuno. (nei,ist/dya)



## Nasib IKN di ... (dari Hal 1)

**KOMISI V DPR RI** meradang imbas efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

Pasalnya efisiensi anggaran itu disebut berdampak pada pembangunan infrastruktur di daerah.

Kekesalan Komisi V DPR RI itu disampaikan anggota DPR RI fraksi PDIP Adian Napitupulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis (6/2/2025) seperti dilihat di TV Parlemen.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi V menghujani pimpinan DPR RI dengan intrupsi. Salah satunya yang memberikan intrupsi yakni Adian Napitupulu.

Adian memprotes kebijakan Kementerian PU yang menghemat anggaran Rp81 triliun sesuai instruksi Presiden.

Terlebih penghematan anggaran tersebut disebut berdampak pada pembangunan infrastruktur.

Adian Napitupulu mengatakan pengurangan anggaran Rp81 triliun sangat berdampak pada rakyat. Ia mencontohkan, program sumberdaya air Rp10 triliun untuk program ketahanan pangan pasti tidak akan tercapai.

Sehingga kedepannya selama satu tahun ini kata Adian Napitupulu DPR RI harus rela berbohong dulu ke rakyat karena tidak bisa berbuat apa-apa.

"Jadi menurut saya, teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa di dapilnya. Jadi pembohonglah setahun. Tidak mampu menepati janjinya. Karena memang (anggaran) itu tidak bisa diutak-atik ini," kata Adian.

Adian mengatakan dirinya tak mempersoalkannya lagi karena anggaran tidak bisa lagi diutak-atik.

"Toh yang mempertanggungjawabkan secara keseluruhan kepada rakyat adalah pemerintah. Ketika rakyat tidak mendapatkan apa-apa di bawah. Ketika jalan tidak terbangun, irigasi tidak terbangun, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Jadi apapun resikonya kita terima," ujarnya.

Salah satu yang mulai tampak berdampak adalah pembangunan IKN. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui pembangunan IKN belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dia menjelaskan blokir berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya

belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kata Dody tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1/2025).

Siang ini, Komisi V DPR telah menyetujui efisiensi anggaran Kementerian PU. Anggaran Kementerian itu tinggal Rp29,57 triliun setelah dipangkas Rp81,38 triliun.

Setelah ini, kata Dody, dia akan melapor ke Sri Mulyani. Jika laporan sudah dilakukan, blokir anggaran Kementerian PU pun bisa kembali dibuka.

"Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekompresi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas," ujarnya.

Anggaran Kementerian PU ikut terpotong dalam efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Awalnya, Kementerian PU mendapatkan anggaran Rp110,95 triliun untuk 2025.

Anggaran itu dipangkas Rp81,38 triliun. Dody menyebut sejumlah proyek infrastruktur terdampak pemotongan anggaran.

### Menteri AHY Menepis

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029, yang akan digunakan secara bertahap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

"Terkait IKN, pembangunan ini dipastikan akan berlanjut. Presiden juga telah memastikan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahun 2025 hingga 2029. Anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan tahapan dan rencana yang telah disusun sejak awal," ujar Menteri AHY dalam keterangannya, seperti dikutip dari presidenri.go.id, Kamis (6/2/2025).

Menteri AHY juga menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus kini beralih ke pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif.

"Jadi, ada beberapa penyesuaian yang tentu membutuhkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan setelah itu bisa segera dibangun," jelasnya.

Menteri AHY juga menyampaikan harapannya agar pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Ia berkomitmen untuk terus

melaporkan perkembangan terkini kepada Presiden.

"Jadi, itulah yang menjadi fokus pembahasan rapat terbatas tadi sore. Kami juga akan melaporkan perkembangan berikutnya pada kesempatan pertama kepada Pak Presiden," katanya.

Selain itu, Menteri AHY menegaskan bahwa meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran, misi Presiden Prabowo dan berbagai agenda nasional harus tetap terlaksana

### Ekonom Ingatkan Dampaknya

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta ketidakmasukakalan proyek ini menjadi faktor utama yang menghambat kelanjutan IKN.

Salah satu indikasi besar terhambatnya proyek ini adalah batalnya Jokowi meresmikan Istana Negara di IKN sebelum akhir masa jabatannya—sebuah target ambisius yang akhirnya tak terwujud.

"Mereka (Buzzer) yang berupaya untuk menanam semacam harapan bahwa Pak Jokowi akan meresmikan Istana IKN di ujung kepemimpinannya tidak terjadi," kata Rocky Gerung seperti dikutip redaksi lewat kanal YouTube miliknya.

Rocky juga mengungkap bahwa Jokowi berharap Prabowo akan mengalokasikan 30 persen dari APBN untuk menyelesaikan pembangunan tahap akhir IKN. Namun, harapan tersebut tampaknya tidak akan menjadi kenyataan.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus pakar ekonomi dan bisnis Rhenald Kasali menegaskan bahwa pemerintah harus bijak saat melakukan efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L). Pemangku kepentingan terkait perlu menyisir dengan cermat program-program yang dimiliki sehingga anggaran yang terbatas itu benar-benar digerakkan dan dimanfaatkan dengan baik ke program prioritas serta tepat sasaran.

"Ketika melakukan efisiensi, itu artinya kita membuang lemak, bukan membuang otot dan tulang. Kalau satu institusi itu yang dibuang ototnya, dia akan lumpuh. Pun jika tulangnya dipotong, itu akan hancur, tidak bisa jalan," kata Rhenald di Jakarta.

Lebih lanjut, ia pun menilai efisiensi anggaran ini sebagai sebuah langkah yang baik. Namun, perhatian tidak bisa hanya tertuju pada anggaran yang dimiliki oleh K/L saja, melainkan eksekusi program yang juga harus dilakukan dengan efisien.

"Langkah pertama efisiensi ini memang banyak dipertanyakan masyarakat, karena semuanya

ditujukan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Namun, penting juga bagi pemerintah berikan dukungan yang baik kepada masyarakat," kata Rhenald.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama menjelaskan efisiensi anggaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi RI jika digunakan untuk belanja produktif. Maka dari itu, diperlukan strategi yang benar untuk mencapai cita-cita pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029.

"Efisiensi ini dilakukan harapannya realokasi anggaran itu ke belanja produktif bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak produktif justru mendorong perlambatan," ujar Riza dalam konferensi pers Kamis (6/2/2025).

Secara rinci, dia menjelaskan saat ini pemerintah memiliki berbagai program yang harus direalisasikan, termasuk program-program bawaan dari periode sebelumnya.

Salah satu tantangan yang muncul adalah potensi penerimaan perpajakan yang hilang sebesar Rp3,5 triliun, sementara insentif yang diberikan melalui APBN tetap berjalan. Pemerintah telah mengalokasikan dana insentif sebesar Rp 265,6 triliun dari APBN yang sudah ketat, sementara kebutuhan anggaran pemerintahan terus meningkat.

Di sisi lain, pemerintah juga diberat oleh beberapa kementerian yang meminta tambahan anggaran di tahun 2025. Adapun total tambahan diperkirakan akan mencapai Rp 5,1 triliun.

Tidak sampai di situ, Riza mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengatakan bahwa dana sebesar Rp 71 triliun tidak cukup untuk mencakup kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ada dan membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 100 triliun.

"Berarti dari ketiga tambahan dana di atas dibutuhkan sekitar Rp 370 triliun, sementara efisiensi itu hanya Rp 306 triliun," ujarnya.

Kalau dipakai untuk ketiga ini, Riza mengatakan efisiensi anggaran dapat mendorong pertumbuhan. "Misalnya dalam insentif PPN 12% ini kan ada sektor perumahan saya harap ini dapat disambut insentif ini sehingga mendorong sektor properti," ujarnya.

Selain itu, efisiensi anggaran juga perlu mempertimbangkan belanja kementerian agar lebih produktif. Kementerian-kementerian diharapkan mampu menggunakan anggaran ini untuk kegiatan yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dengan tidak mengorbankan UMKM. (din, wid, rls, ant, kum/dya)

# Buka-bukaan KPK di Sidang Praperadilan Hasto Kabur saat OTT, Kucurkan Rp 400 Juta Bantu Masiku

**JAKARTA** - KPK mengatakan upaya pengejaran dan penangkapan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus suap Harun Masiku sudah dilakukan sejak 2020. KPK mengatakan pihaknya berupaya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap semua pihak yang diduga terlibat kasus suap tersebut.

"Termohon telah melakukan penyelidikan tertutup dengan mengupayakan tangkap tangan kepada pihak-pihak yang terlibat serta telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor 146 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di KPU pusat terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024," kata anggota tim Biro Hukum KPK saat memberikan jawaban atas praperadilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Dia mengatakan KPK saat itu mengamankan Wahyu Setiawan, Saeful Bahri, Donny Tri Istiqomah, Agustiani Tio Fridelina dalam OTT pada 8 Januari 2020. Dia mengatakan KPK juga bergerak mengejar Hasto dan Harun Masiku.

"Dalam upaya tangkap tangan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 tersebut, Termohon berhasil mengamankan beberapa pihak yang terlibat, di antaranya Wahyu Setiawan di Bandara Soetta, Saeful Bahri, Donny Tri Istiqomah di rumah makan pada Jalan Sabang, Jakarta, dan Agustiani Tio di rumahnya. Termohon juga mengamankan saudara sepupu Wahyu Setiawan di Banyumas beserta istrinya. Selanjutnya Termohon juga bergerak mengejar Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto atau Pemohon dengan bermaksud untuk mengamankan," ujarnya.

Dia mengatakan mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, langsung menyampaikan konferensi pers terkait hasil OTT tersebut. Padahal saat itu Hasto dan Harun belum diamankan.

"Pada hari yang sama tanggal 8 Januari 2020 sore hari sekitar jam 16.00 WIB, Firli Bahuri Ketua KPK menyampaikan konferensi pers melalui media bahwa sedang dilakukan OTT KPK pada KPU. Padahal Termohon belum sempurna melakukan tangkap tangan karena Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto belum bisa diamankan," ujarnya.

Dia mengatakan Hasto juga memerintahkan Harun merendam ponselnya dan melarikan diri. Dia



menuturkan hal itu diketahui dari hasil penyadapan.

"Dalam proses pengejaran kepada Harun Masiku dan Pemohon tersebut, ada petunjuk yang didapatkan oleh Termohon atas penyadapan tanggal 8 Januari 2020 jam 19.54 WIB bahwa terdapat perintah dari Pemohon kepada Nur Hasan, penjaga Rumah Inspirasi, Jalan Sutan Sjahrir Nomor 12 A, yang digunakan Pemohon berkantor, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam handphone di air dan agar Harun Masiku untuk melarikan diri dari kejaran petugas," ujarnya.

Hasto diduga juga turut menyokong dana sebesar Rp 400 juta untuk memperlancar proses tersebut. Uang dititipkan Hasto melalui stafnya, Kusnadi.

Mulanya, KPK mengungkapkan, pada awal September 2019, kader PDIP sekaligus mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio, diminta untuk melobi Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, terkait proses PAW Harun Masiku.

Permintaan itu disampaikan kepada Agustiani oleh kader PDIP, Saeful Bahri, atas perintah Donny Tri Istiqomah.

Pada Pileg 2019, Harun Masiku berasal dari Dapil 1 Sumsel. PDIP mendapat jatah satu kursi dari dapil tersebut. Diduga ada upaya untuk meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW. Meski, Harun Masiku jauh berada di nomor urut 6.

Dari hasil lobi, Agustiani Tio menyampaikan Wahyu meminta uang sebesar Rp 1 miliar. Saeful kemudian meminta Agustiani agar kembali meminta pengurangan biaya.

"Atas permintaan tersebut Saeful Bahri meminta Agustiani Tio Fridelina untuk menawar dan akhirnya disepakati bahwa biaya operasional bahwa sebesar Rp 900 juta," ujar tim Biro Hukum KPK.

Setelah itu, Donny Tri dan Saeful

Bahri menemui Harun Masiku di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan adanya biaya tersebut. Harun pun sepakat.

Pada 13 Desember 2019, Saeful juga melaporkan terkait kesepakatan biaya itu kepada Hasto. Rupanya, Hasto setuju dan bahkan siap menalangnya.

"Pada saat itu, Hasto mengatakan

'ya silakan saja, bila perlu saya menyanggupi untuk menalangnya dulu biar urusan Harun Masiku cepat selesai'," ungkap tim Biro Hukum KPK.

Kemudian pada 16 Desember 2019, Kusnadi selaku staf Hasto menemui Donny Tri di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat. Di sana, Kusnadi menyampaikan sebuah amplop berisi uang.

"Saat itu, Kusnadi menitipkan uang yang dibungkus amplop warna cokelat yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam dan mengatakan 'mas ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan uang operasional Rp 400 juta ke Pak Saeful, yang Rp 600 juta Harun, katanya'," beber KPK.

Kemudian, setelah itu Donny Tri menghubungi Saeful Bahri dengan menyatakan uang untuk mengurus PAW Harun Masiku sudah ada ditangannya. Uang yang disampaikan berbentuk pecahan Rp 50 ribu dengan total nilai Rp 400 juta. (wid, rls, ist, ant/dya)

KPK  
 Dinas Kelautan & Perikanan  
 Provinsi Jawa Timur

MENGUCAPKAN

SELAMAT HARI  
**PERS NASIONAL**

HARI PERS NASIONAL  
 KALAMANTHAN SELATAN  
 2025

Pers Mengawal Ketahanan Pangan  
 untuk Kemandirian Bangsa

09 FEBRUARI 2025

**Dr Ir Muhammad Isa Anshori, ATD., MT**  
 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Povinsi Jawa Timur